

Kata Pengantar

Pembaca yang budiman.

Alhamdulillah Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Jurnal Integritas Serasan Sekundang (JISS) Volume 03 Nomor 01 , Tahun 2023 dapat diterbitkan. JISS adalah terbitan perdana pada tahun 2019 dan telah terakreditasi LIPI dengan Nomor : JISS dengan ruang lingkup fokus yaitu Kajian Praktisi-Akademis, Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Teknologi.

Tulisan yang dimuat pada JISS semuanya telah diseleksi. ditelaah dan di-review oleh Dewan Redaksi dan Mitra bestari yang kompeten di bidangnya. Tulisan tulisan yang berkualitas baik dan sesuai dengan ruang lingkup JISS saja yang dapat diterbitkan. Penerbitan JISS Volume 03. Nomor 01 Tahun 2021 menyajikan 5 artikel yang terdiri dari 1 tulisan tentang Pariwisata, 2 tulisan tentang pendidikan, 1 tulisan Pemerintahan dan 1 tulisan Budaya

JISS diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan Industri nasional. khususnya di bidang agroindustri. JISS diharapkan juga mampu menjadi motivasi bagi para peneliti, perekayasa, dosen.

Dewan redaksi menyampaikan terima kasih kepada penulis, mitra bestari dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terlibat dalam penerbitan JISS pada Volume 03 Nomor 01 Tahun 2021. Akhirnya. kami mengundang peneliti, perekayasa. praktisi dan mahasiswa mengirimkan naskah untuk diterbitkan di JISS. Kami menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca, pelanggan dan para pihak lain demi peningkatan kualitas JISS.
Selamat membaca.

Muara Enim, Desember 2021
Ketua Dewan Redaksi

M. Tarmizi Ismail, S.E., M.S.i

JURNAL INTEGRITAS SERASAN SEKUNDANG (JOURNAL INTEGRITATION SERASAN SEKUNDANG)	
p-ISSN e-ISSN	Vol, 03, No. 01, 2021
ABSTRAK	
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN MUARA ENIM ¹Tarmizi Ismail, ¹Sukiani, ²Azwardi, Sukanto, ²Abdul Bashir, ¹Sagita Desta Ria ¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ² Fakultas Ekonomi Univeristas Sriwijaya, Palembang Sumatera Selatan ABSTRAK Tujuan studi untuk Rencana Aksi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim. Metode yang digunakan berupa mixed method dengan analisis minimum yaitu analisis kuantitatif yang didukung analisis kualitatif deskriptif. Adapun dua pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pertama, pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil studi ini menunjukkan prioritas produk UMKM yang mendorong pengembangan pariwisata adalah industri kreatif kuliner dan kerajinan tangan. Kedua jenis produk ini melibatkan partisipasi masyarakat sehingga keberlangsungannya dapat terjamin. Selain itu, Kabupaten Muara Enim memiliki potensi desa wisata yang telah mendapat pendampingan pihak ketiga sehingga implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat terwujud. Temuan lain dari studi ini juga menunjukkan bahwa Regulasi (peraturan pemerintah daerah) dan Kelompok Sadar Wisata berpengaruh besar terhadap keberadaan desa wisata namun berdampak kecil. Sementara itu, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, keberadaan objek wisata dan promosi, logistik (travel agen, homestay, tiket) memiliki pengaruh dan dampak besar terhadap perkembangan desa wisata. Kata kunci: Rencana aksi, Pariwisata, Pemberdayaan, UMKM	
ABSTRACT	
<i>The study makes the Action Plan for tourism development through empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Muara Enim Regency. The method used is a mixed-method with a minimum analysis that is quantitative analysis supported by descriptive qualitative analysis. The two approaches used in this activity are first, the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach. The results of this study show that the priority of MSME products that encourage tourism development is the culinary and handicraft creative industries. Both types of products involve community participation so that its sustainability can be guaranteed. In addition, Muara Enim Regency has the potential of a tourism village that has received third party assistance so that the implementation of sustainable tourism development can be realized. Other findings from this study also show that local government regulations and the Tourism Awareness Group have a big influence on the existence of a tourism village but with little impact. Meanwhile, infrastructure, the quality of human resources, the existence of attractions and promotions, logistics (travel agents, homestays, tickets) have a great influence and impact on the development of tourism villages.</i> Keywords: Action plan, Tourism, Empowerment, MSMEs	

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata dan industri terutama UMKM merupakan salah satu komponen dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan pariwisata dan UMKM harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi multiplier effect untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain.

Kabupaten Muara Enim merupakan sebuah wilayah yang diberkahi oleh lingkungan alam yang indah dan yang memiliki potensi pariwisata yang memikat, baik yang telah terorganisir dengan baik maupun yang belum di rambah. Sektor pariwisata dapat menjadi salah satu potensi unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai berkembangnya sektor lain, diantaranya Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

UMKM sebagai penyangga perekonomian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu, UMKM juga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta mendorong peningkatan distribusi hasil-hasil pembangunan daerah.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim dapat menjadi salah satu program dalam menciptakan lapangan pekerjaan tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan dan keahlian khusus.

Pengembangan UMKM dan potensi

yang terdapat di Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata di Kabupaten Muara Enim, karena dapat memberikan daya tarik pada sektor pariwisata di Kabupaten Muara Enim. Potensi sektor pariwisata yang terdapat di Kabupaten Muara Enim terdiri dari wisata air terjun dan wisata lainnya yang berkembang di wilayah dataran tinggi Semende, serta Desa Kayu Ara Sakti Gunung Megang yang saat ini telah dikembangkan untuk menjadi salah satu potensi pariwisata.

Selain itu, produk unggulan yang menjadi ciri khas di Kabupaten Muara Enim yang tersebar di berbagai Kecamatan seperti Kerupuk Kemplang, Telor Asin, Kopi Semende, Minuman Jahe Merah, Kerajinan Tangan, Ayam, Kain Batik dan lain-lain. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa selama periode 2014-2018 pertumbuhan UMKM mencapai 5.45 persen. Menurut sebarannya, jenis usaha yang tumbuh cukup tinggi adalah usaha mikro sebesar 6.19 persen. Untuk usaha kecil hanya tumbuh 0.30 persen dan usaha menengah tidak mengalami perubahan. Secara umum permasalahan yang di hadapi UMKM antara lain (1) produk belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas; (2) masih terbatasnya akses permodalan; (3) minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKM; dan (4) sentra-sentra produksi Industri UMKMK belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama.

Tabel 1.1. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim Tahun 2014-2018

Jenis usaha	Tahun					Pertumbuhan (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Usaha Mikro	3.525	3.550	3.973	4.648	4.760	6,19
Usaha Kecil	530	535	535	535	538	0,30
Usaha Menengah	38	38	38	38	38	0,00
Total	4.093	4.123	4.546	5.221	5.336	5,45

Pada 2018 sebaran UMKM di Kabupaten Muara Enim masih didominasi oleh usaha mikro sebanyak 4.760 unit usaha (89.21 %), usaha kecil sebanyak 538 unit usaha (10.08 %), dan usaha menengah sebanyak 38 unit usaha (0.71 %). Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait seperti pemberdayaan dengan dukungan program CSR (corporate social responsibility), perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan dirasakan masih belum optimal.

Pada kenyataannya berbagai upaya tersebut berjalan sendiri-sendiri, tidak terpadu dan tidak merata ke seluruh wilayah atau jenis usaha. Sehingga, beberapa unit UMKM mendapatkan pembinaan yang intensif dan mendapatkan bantuan fasilitas, peralatan dan kesempatan promosi dalam pameran sehingga mudah dikenal masyarakat disisi lain masih banyak UMKM yang belum tersentuh dan mendapatkan bantuan fasilitas, peralatan dan lainnya. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka diperlukan penyusunan perencanaan aksi pengembangan wisata melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim.

Pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten

Muara Enim adalah suatu kegiatan yang melakukan identifikasi permasalahan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim dengan melibatkan stakeholder di Kabupaten Muara Enim melalui pembentukan kelompok kerja. Dari hasil kelompok kerja mengkaji Produk UMKM ini akan dipetakan dan diinventarisir permasalahan di beberapa wilayah yang memiliki potensi Pariwisata yang selanjutnya memberdayakan UMKM sekitar.

Peta/inventarisir permasalahan ini selanjutnya akan disusun roadmap/rencana aksi yang akan disusun dalam kegiatan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terinventarisir. Diharapkan dengan adanya roadmap/rencana aksi ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pariwisata melalui pemberdayaan UMKM.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Roadmap/Rencana Aksi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim antara lain sebagai berikut:

- (1) Kondisi Pariwisata dan UMKM lingkup Kabupaten Muara Enim;
- (2) Program/kegiatan yang telah dilakukan oleh OPD terkait dan BUMD/BUMS serta UMKM lingkup

Kabupaten Muara Enim;

- (3) Rencana Aksi *Stakeholder* terkait untuk merencanakan program/kegiatan jangka waktu 5 tahun kedepan dalam rangka pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim;
- (4) Desain pilot project Kecamatan/ Desa “Pengembangan Pariwisata dengan Memberdayakan UMKM” di Kabupaten Muara Enim;
- (5) Pencanaan komitmen bersama stakeholder terkait dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim;
- (6) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kecamatan / Desa yang menjadi Pilot Project.

2.2 Metode

Metode yang digunakan berupa *mixed method* dengan analisis minimum yaitu analisis kuantitatif yang didukung analisis kualitatif deskriptif. Adapun dua pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu *pertama*, pendekatan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP), metode ini untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Peralatan utama *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) adalah memiliki sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur

menjadi suatu bentuk hirarki. *Kedua*, pendekatan SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk menginventarisir situasi internal dan eksternal seperti Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (kesempatan), dan Threats (ancaman). Selanjutnya membuat strategi yang dapat dilakukan seperti:

- (1) Strategi S-O (*Strength-Opportunity*), menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang yang ada;
- (2) Strategi S-T (*Strength-Threat*), menggunakan kekuatan untuk menghindari dan mengatasi ancaman;
- (3) Strategi W-O (*Weakness-Opportunity*), menggunakan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan;
- (4) Strategi W-T (*Weakness-Threat*), berupaya meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Selain itu dilakukan pula pemetaan potensi pariwisata dengan mendorong berkembangnya UMKM. Pemetaan dilakukan dengan ArGis sehingga terlihat secara jelas potensi desa yang dijadikan unggulan. Desa-desa yang memiliki keunggulan menurut data Rumah Gerbang Serasan sebanyak 15 desa yang tersebar di 7 Kecamatan. Pemilihan 15 desa dengan pertimbangan adanya aspek keberlanjutan, desa-desa tersebut telah didampingi pihak ketiga dalam pengembangan produk-produk lokal.

Setelah ditemukan potensi pariwisata dan produk unggulan di desa wisata, analisis dilanjutkan dengan melihat faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan desa wisata. Pemetaan terhadap pengaruh dilakukan dengan Program Micmac. Pengaruh dan dampak dari setiap faktor dipetakan dalam empat

kuadran, sebagai berikut:

Pengaruh	Pengaruh Besar dan Dampak Kecil	Pengaruh Besar dan dampak Besar
	Pengaruh Kecil dan Dampak Kecil (outonomous)	Pengaruh Kecil dan Dampak Besar
	Ketergantungan	

Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari observasi lapangan dan *Focus Group Discussion*. Selain itu, data pendukung dan informasi penunjang evaluasi bersumber dari Badan Pusat Statistik. *Stakeholder* daerah yang di libatkan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Aksi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim.

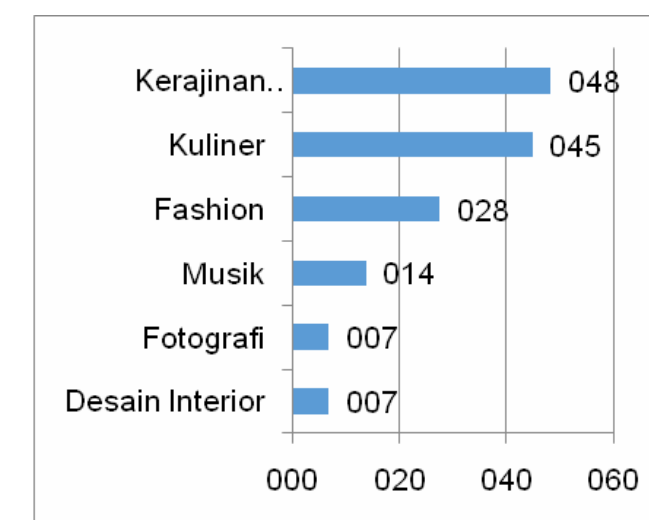
1. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS AHP

Hasil identifikasi yang telah dilakukan melalui pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam menentukan prioritas pengembangan UMKM di bidang industri kreatif di Kabupaten Muara Enim terbagi dalam tiga prioritas yaitu (1) pengembangan prioritas industri kreatif dalam jangka pendek; (2) pengembangan prioritas ndustri kreatif dalam jangka menengah; (3) pengembangan prioritas industri kreatif dalam jangka panjang. Adapun hasil penentuan prioritas pengembangan UMKM di bidang industri kreatif di Kabupaten Muara Enim di sajikan pada analisis sebagai berikut :

A.1. Prioritas Jangka Pendek

Hasil dari perhitungan bobot AHP berdasarkan peringkat untuk pengembangan potensi dalam jangka pendek pada industri kreatif di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa ada empat dari enam industri kreatif yang memiliki bobot lebih dari 25 persen yaitu unit usahakerajinan tangan songket dengan bobot sebesar 48.28 persen, di ikuti unit usahakuliner sebesar 44.83 persen, dan unit usaha fashion sebesar 25.59 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek pemberdayaan UMKM (industri kreatif) yang prioritas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim unit usaha kuliner, kerajinan tangan songket, desain interior, dan unit usaha fashion.

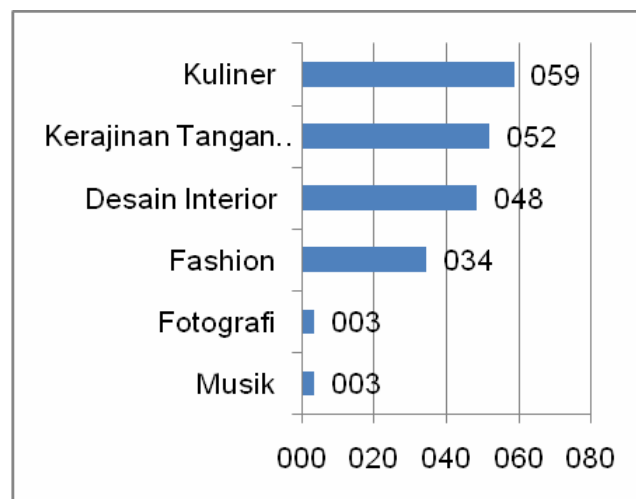


Gambar 1. Pengembangan Potensi Industri Kreatif dalam Jangka Pendek di Kabupaten Muara Enim

A.2. Prioritas Jangka Menengah

Hasil dari perhitungan bobot AHP berdasarkan peringkat untuk pengembangan potensi dalam jangka

pendek pada industri kreatif di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa ada empatdari enam industri kreatif yang memiliki bobot lebih dari 25 persen yaituunit usaha kuliner dengan bobot sebesar 56.62 persen, di ikuti unit usaha kerajinan tangan songket sebesar 51.72 persen, desain interior sebesar 48.28 persen, dan unit usaha fashion sebesar 34.48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek pemberdayaan UMKM (industri kreatif) yang prioritas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim unit usaha kuliner, kerajinan tangan songket, desain interior, dan unit usaha fashion.

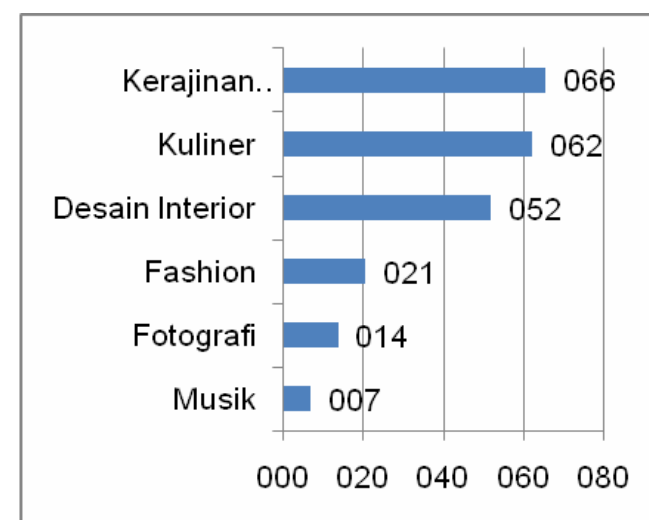


Gambar 2. Pengembangan Potensi Industri Kreatif dalam Jangka Menengah di Kabupaten Muara Enim

A.3. Prioritas Jangka Panjang

Hasil dari perhitungan bobot AHP berdasarkan peringkat untuk pengembangan potensi dalam jangka pendek pada industri kreatif di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa ada empatdari enam industri kreatif yang memiliki bobot lebih dari 25 persen yaitu unit usaha kerajinan tangan songketdengan bobot sebesar 65.52

persen, di ikuti unit usaha kuliner sebesar 62.07 persen, dan desain interior sebesar 51.72 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek pemberdayaan UMKM (industri kreatif) yang prioritas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim unit usaha kuliner, kerajinan tangan songket, desain interior, dan unit usaha fashion.



Gambar 3. Pengembangan Potensi Industri Kreatif dalam Jangka Panjang di Kabupaten Muara Enim

A.4. Aspek Permasalahan Pengembangan Pariwisata

Hasil identifikasi aspek permasalahan pengembangan pariwisata dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Muara Enim dapat inventarisir dalam 15 (limabelas) aspek antara lain:

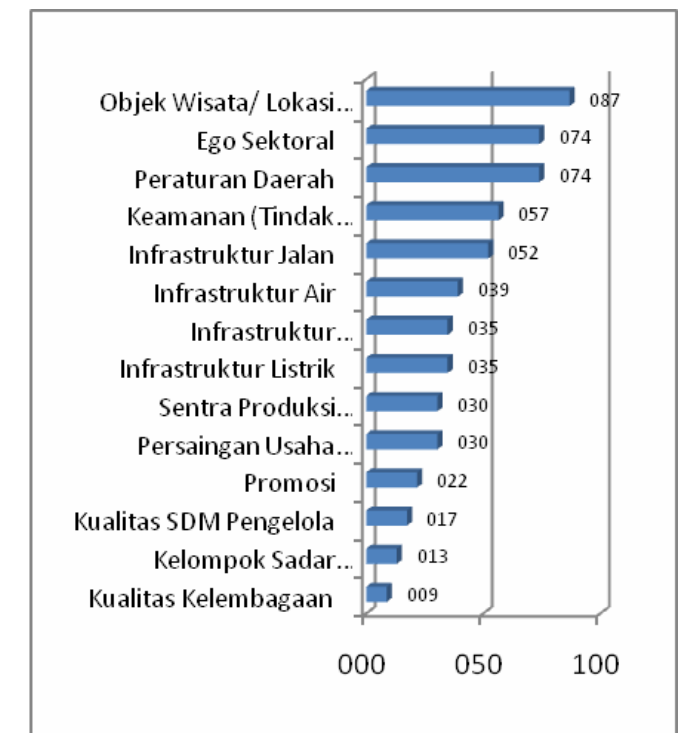
- (1) Objek Wisata/ Lokasi Wisata
- (2) Infrastruktur Listrik
- (3) Infrastruktur Air
- (4) Infrastruktur Komunikasi
- (5) Infrastruktur Jalan
- (6) Kualitas SDM Pengelola
- (7) Promosi
- (8) Kelompok Sadar Wisata

- (9) Kualitas Kelembagaan
- (10) Persaingan Usaha Wisata
- (11) Sentra Produksi (UMKM) Pendukung Pariwisata
- (12) Keamanan (Tindak Kriminal, Perampokan dan Pencurian)
- (13) Peraturan Daerah
- (14) Ego Sektoral, dan lain-lain

A.5. Aspek Permasalahan Pengembangan Pariwisata Jangka Pendek

Aspek permasalahan utama pengembangan pariwisata dalam jangka pendek di Kabupaten Muara Enim adalah pengembangan kawasan objek wisata/lokasi wisata, pengendalian ego sektoral, peraturan daerah, keamanan, dan peningkatan infrastrukturjalan. Meskipun demikian,yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung pengembangan pariwisata tersebut adalah persaingan usaha wisata, peningkatan promosi pariwisata, kualitas SDM pengelola, peningkatan sosialisasi dan membentuk kelompok sadar wisata, dan peningkatan kualitas kelembagaan, karena hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Muara Enim.

Menjadi sangat penting apabila pemerintah Kabupaten Muara Enim ingin melakukan rencana aksi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim, sehingga tujuan dan sasaran dalam mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan di Kabupaten Muara Enim.



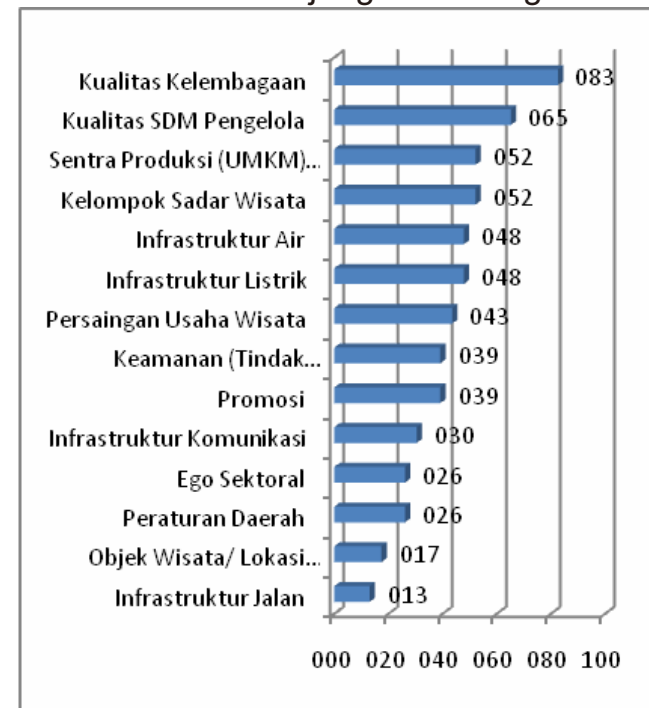
Gambar 4. Aspek Permasalahan Pengembangan Pariwisata dalam Jangka Pendek

Sumber : Data Lapangan, 2019

A.6. Aspek Permasalahan Pengembangan Pariwisata Jangka Menengah

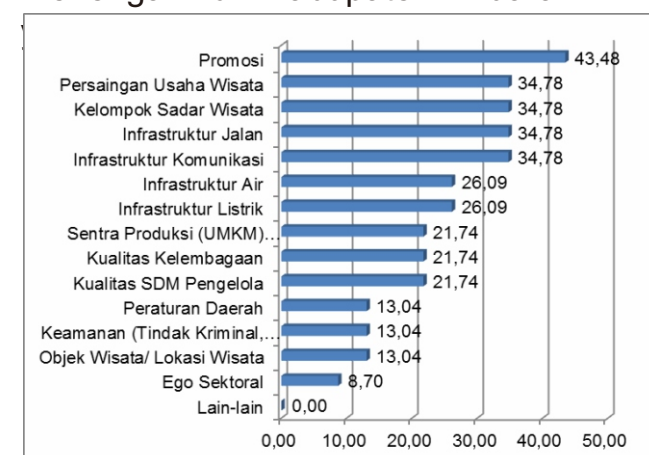
Aspek permasalahan utama pengembangan pariwisata dalam jangka menengah di Kabupaten Muara Enim adalahKualitas Kelembagaan, Kualitas SDM Pengelolaan, Sentra Produksi dan Kelompok Sadar Wisata.Meskipun demikian,yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung pengembangan pariwisata tersebut adalah Infrastruktur Komunikasi, Ego Sektoral, Peraturan Daerah, Objek Wisata/Lokasi Wisata, Infrastruktur Jalan, karena hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten

Muara Enim dalam jangka menengah

Gambar 5. Aspek Pengembangan Pariwisata dalam Jangka Menengah
Sumber : Data Lapangan, 2019

A.7. Aspek Permasalahan Pengembangan Pariwisata Jangka Panjang

Aspek permasalahan utama pengembangan pariwisata dalam jangka menengah di Kabupaten Muara Enim

Gambar 6. Aspek Pengembangan Pariwisata dalam Jangka Panjang
Sumber : Data Lapangan, 2019

Promosi, Pesaingan Usaha Wisata, Kelompok Sadar Wisata, Infrastruktur Jalan, dan Infrastruktur Komunikasi. Meskipun demikian, yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung pengembangan pariwisata tersebut adalah Kualitas SDM Pengelola, Peraturan Daerah, Keamanan dan Objek Wisata, karena hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim dalam jangka menengah

A.8. Upaya Pengembangan UMKM

Perkembangan UMKM di Kabupaten Muara Enim juga di dorong oleh program pemerintah pusat dan daerah antara lain (1) program pelatihan peningkatan kapasitas bagi SDM dalam UMKM berupa pelatihan kewirausahaan, pelatihan perkoperasian, pelatihan *technopreneur*, pelatihan *vocational*, dan pelatihan berbasis kompetensi; (2) fasilitasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK); (3) fasilitasi promosi dan pameran bagi UMKM.

Adapun upaya percepatan untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Kabupaten Muara Enim antara lain:

- (1) Melakukan penguatan pada program-program yang menjadi titik lemah di dalam capaian kinerja tersebut, seperti Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi,
- (2) Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga Koperasi, Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
- (3) Pengembangan jaringan infrastruktur UMKM, fasilitasi kemudahan formalisasi Badan UMKM, fasilitasi

- pengembangan sarana promosi hasil produksi,
- (4) Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM, memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, penyelenggaraan promosi produk UMKM, sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan,

- (5) Koordinasi penggunaan Dana pemerintah bagi umkm serta koordinasi pemanfaatan fasilitasi Pemerintah untuk UMKM.

Tabel 1. Analisis Matriks SWOT

Situasi Internal (IFAS)	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	1. Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat untuk industri dan perdagangan yaitu berupa Potensi Sumberdaya Alam sebagai bahan baku melimpah 2. Pertumbuhan Ekonomi yang relatif stabil 3. Keamaan yang kondusif 4. Sebaran dan Jumlah UMKMK yang merata 5. Mulai berkembangnya BUMDesa	1. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM aparatur maupun pelaku usaha 2. Produk belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas 3. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKM 4. Sentra-sentra produksi Industri UMKMK belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama 5. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi 6. Terbatasnya akses permodalan bagi koperasi dan UMKM 7. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung koperasi dan UMKM
Situasi Eksternal (EFAS)		

Situasi Internal (IFAS)	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	1. Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat untuk industri dan perdagangan yaitu berupa Potensi Sumberdaya Alam sebagai bahan baku melimpah 2. Pertumbuhan Ekonomi yang relatif stabil 3. Keamanan yang kondusif 4. Sebaran dan Jumlah UMKMK yang merata 5. Mulai berkembangnya BUMDesa	1. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM aparatur maupun pelaku usaha 2. Produk belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas 3. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKMK 4. Sentra-sentra produksi Industri UMKMK belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama 5. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi 6. Terbatasnya akses permodalan bagi koperasi dan UMKMK 7. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung koperasi dan UMKMK
Situasi Eksternal (EFAS)		
OPPORTUNITY (O)	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
1. Terbukanya peluang memasuki pasar bebas 2. Terbukanya pasar produk kerajinan, kesempatan promosi, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi 3. Adanya bantuan modal usaha dari Pemerintah Daerah melalui GERBANG SERASAN, Perbankan dan Pihak Swasta 4. Jumlah usaha bidang perdagangan dan industri terus bertambah 5. Adanya dukungan pendanaan dari Dana Desa dan ADD 6. Kebijakan Pemerintah yang sangat mendukung perkembangan koperasi dan UMKMK 7. Animo masyarakat yang tinggi dalam membuka	1. Meningkatkan penguatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan 2. Optimalisasi pengelolaan potensi unggulan desa dan pengembangan usaha Bumdes 3. Meningkatkan kemitraan dan jaringan dengan masyarakat serta dunia usaha 4. Mengupayakan pangaanggran sarana prasarana di desa yang bersumber dari pendanaan lainnya	1. Kerja sama dalam menyediakan kredit bagi pelaku UMKMK dengan bunga rendah. 2. Memperluas jaringan pemasaran. 3. Memperbaiki kualitas SDM. 4. Menerapkan teknologi yang tepat guna. 5. Menciptakan Iklim usaha yang kondusif. 6. Menyediakan sarana dan prasarana usaha yang memadai

Sumber : Tim Ahli

Tabel 2 Strategi Operasional Pengembangan Kepariwisataan

Lingkup Pengembangan Kepariwisataan	Strategi Operasional
Pembangunan Destinasi Pariwisata	1. Pengembangan daya tarik wis ata utama di setiap kawasan pariwisata unggulan berstandar lokal, regional dan nasional 2. Pengembangan jalur wisata tematik dengan tema utama Kabupaten Muara Enim 3. Pembangunan fasilitas dan prasarana umum tematik di setiap jalur wisata (air bersih, jaringan komunikasi, listrik, rumah singah) 4. Pengembangan koordinasi lintas sektor dan kerja sama dengan dunia usaha dalam pengembangan aksesibilitas nasional. 5. Pengembangan investasi usaha pariwisata berbasis wisata alam, kuliner, ilmu pengetahuan, ekowisata, sert a penyelenggaraan pameran berstandar nasional.
Pembangunan Industri Pariwisata	1. Pengembangan usaha pariwisata tematik, berbasis masyarakat, berstandar nasional.
Pembangunan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dan tematik Kabupaten Muara Enim 2.Pengembangan paket wisata tematik dan interpretatif.
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan	1. Pengembangan koordinasi berkesinambungan dalam pembangunan aksesibilitas yang menghubungkan pusat - pusat pariwisata dengan daya tarik wisata ung gulan, di Kabupaten Muara Enim. 2. Pengembangan koordinasi tahunan dalam penyepakatan, penetapan, dan pelaksanaan program strategis bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media). 3. Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

B. ANALISIS MATRIKS SWOT

Hasil identifikasi yang telah dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada kondisi UMKM dan berikutnya adalah menganalisis faktor-faktor tersebut untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi UMKM pada

masyarakat sehinga dapat ditentukan strategi dan langkah-langkah yang dapat diterapkan kedepannya. Langkah awal tahap analisa terhadap faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pemberdayaan UMKM adalah dengan melakukan analisa melalui matrik IFAS (*Internal Strategic Faktor Analisis Summary*) dan EFAS

(*Eksternal Strategic Faktor Analisis Summary*) Selanjutnya dari hasil analisa dengan menggunakan matrik IFAS dan EFAS akan dianalisis dengan menggunakan matriks analisis SWOT untuk mendapatkan gambaran akhir kedudukan UMKM di Kabupaten Muara Enim.

C. STRATEGI

C.1. Strategi S-O

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matrik SWOT dari beberapa faktor internal, berupa kekuatan dan peluang, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk menentukan strategi kompetitif bagi UMKM adalah dengan melakukan strategi menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang (Strategi S-O):

1. Meningkatkan penguatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan
2. Optimalisasi pengelolaan potensi unggulan desa dan pengembangan usaha Bumdes
3. Meningkatkan kemitraan dan jaringan dengan masyarakat serta dunia usaha
4. Mengupayakan penganggaran sarana prasarana di desa yang bersumber dari pendanaan lainnya

C.2. Strategi W-O

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matrik SWOT dari beberapa faktor internal, berupa kelemahan dan peluang, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk menentukan strategi kompetitif bagi UMKM adalah dengan melakukan strategi meminimalkan kelemahan dan

memanfaatkan peluang (Strategi W-O):

1. Kerjasama dalam menyediakan kredit bagi pelaku UMKM dengan bunga rendah.
2. Memperluas jaringan pemasaran.
3. Memperbaiki kualitas SDM.
4. Menerapkan teknologi yang tepat guna.
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
6. Menyediakan sarana dan prasarana usaha yang memadai

C.3 Strategi S-T

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matrik SWOT dari beberapa faktor internal, berupa kekuatan dan tantangan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk menentukan strategi kompetitif bagi UMKM adalah dengan melakukan strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan (Strategi S-T):

1. Memberikan pelatihan-pelatihan pada UKM guna meningkatkan mutu produk;
2. Memfasilitasi UKM untuk aspek mesin/peralatan sarana dan prasarana penunjang lainnya;
3. Memfasilitasi UKM untuk aspek permodalan;
4. Meningkatkan penguatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan
5. Optimalisasi pengelolaan potensi unggulan desa dan pengembangan usaha Bumdesa
6. Meningkatkan kemitraan dan jaringan dengan masyarakat serta dunia usaha
7. Mengupayakan penganggaran sarana prasarana di desa yang bersumber dari pendanaan lainnya

C.4. Strategi W-T

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matrik SWOT dari beberapa faktor internal, berupa kelemahan dan tantangan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk menentukan strategi kompetitif bagi UMKM adalah dengan melakukan strategi meminimalkan kelemahan untuk menghadapi tantangan (Strategi W-T):

1. Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan pengembangan komoditas unggulan desa/kawasan perdesaan
2. Membuat regulasi dan pedoman penggunaan anggaran yang bersumber dari APBdes untuk mendukung

peningkatan sarpras di desa

3. Koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder yang terkait dalam kebijakan peningkatan sarana prasarana di desa
 4. Memfasilitasi pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi
- Strategi operasional dalam rangka pengembangan kepariwisataan melalui UMKM mencakup: 1) strategi pembangunan destinasi pariwisata; 2) strategi pembangunan industri pariwisata; 3) strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan 4) strategi pembangunan kelembagaan pariwisata.

Tabel 2 Strategi Operasional Pengembangan Kepariwisata

Lingkup Pengembangan Kepariwisata	Strategi Operasional
Pembangunan Destinasi Pariwisata	(1) Pengembangan daya tarik wisata utama di setiap kawasan pariwisata unggulan berstandar lokal, regional dan nasional (1) Pengembangan jalur wisata tematik dengan tema utama Kabupaten Muara Enim (2) Pembangunan fasilitas dan prasarana umum tematik di setiap jalur wisata (air bersih, jaringan komunikasi, listrik, rumah singah) (3) Pengembangan koordinasi lintas sektor dan kerja sama dengan dunia usaha dalam pengembangan aksesibilitas nasional. (4) Pengembangan investasi usaha pariwisata berbasis wisata alam, kuliner, ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pameran berstandar nasional.
Pembangunan Industri Pariwisata	a. Pengembangan usaha pariwisata tematik, berbasis masyarakat, berstandar nasional.
Pembangunan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dan tematik Kabupaten Muara Enim 2. Pengembangan paket wisata tematik dan interpretatif.
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata	(1) Pengembangan koordinasi berkesinambungan dalam pembangunan aksesibilitas yang menghubungkan pusat-pusat pariwisata dengan daya tarik wisata unggulan, di Kabupaten Muara Enim. (2) Pengembangan koordinasi tahunan dalam penyepakatan, penetapan, dan pelaksanaan program strategis bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media). (3) Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

D. KEBIJAKAN

Pemerintah daerah mempunyai peran yang cukup strategis melalui kebijakan-kebijakan lokal yang lebih terarah serta sesuai karakteristik daerahnya masing-masin. Namun pengembangan pariwisata di banyak daerah di Indonesia masih belum memperoleh prioritas utama. Situasi ini membuat pariwisata tidak menjadi sasaran kebijakan secara langsung, yang terjadi adalah pengembangan pariwisata seringkali berada pada lingkup kebijakan sektor lain. Terlihat dari kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan pariwisata lebih sering dikaitkan dengan kebijakan tentang investasi (akses terhadap sumber Dana). Secara lebih tegas, pariwisata diposisikan sebagai sumber pendapatan bagi daerah (PAD) meski bukan yang utama.

Pengalaman menunjukkan bahwa daerah kurang mampu menggarap potensi yang ada secara maksimal, yang lebih sering muncul adalah penggarapan potensi pariwisata dengan penekanan pada aspek ekonomi saja.Beberapa daerah bahkan menempatkan pengembangan pariwisata sebagai bagian dari fungsi Dinas Pendapatan.Asumsinya adalah bahwa peningkatan pendapatan dapat memberikan imbas kepada aspek-aspek lain termasuk aspek sosial budaya dan juga lingkungan.Otonomi daerah,

dilain sisi juga menjadi problematik, karena melemahkan peran pemerintah pusat di dalam membangun pariwisata di daerah.Hal ini mempunyai implikasi panjang yang sering menimbulkan berbagai dampak negatif.

Berbagai perkembangan dan peristiwa dewasa ini membawa pengaruh besar pada perkembangan kepariwisataan, khususnya kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten Muara Enim.Banyak potensi dan sekaligus permasalahan serta isu baru yang muncul ke permukaan yang membutuhkan penanganan dengan pendekatanyang lebih spesifik.Dinamika tersebut perlu diakomodasi ke dalam produk-produk rencana yang ada di daerah, agar potensi dan permasalahan serta isu-isu baru yang muncul dapat ditampung dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan serta program tindak.Oleh sebab itu, arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Muara Enim sebaiknyaadalah pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan setiap unsur dan sektor yang ada dalam tatanan daerah.Setiap unsur dan sektor bahu membahu secara sinergis untuk dapat mengupayakan model pembangunan kepariwisataan yang tepatsasaran dan sesuaidengan Kultur dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Muara Enim.

Tabel 3. Kebijakan Pembangunan Kawasan terkait Pariwisata

Pengembangan	Kriteria	Arahan Pengembangan
Kawasan Koridor Lahat-Muara Enim	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam aspek : 1. Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.	1. Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional 2. Perlu sinergitas infrastruktur 3. Perlu sinergitas pembangunan antar daerah 4. Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan 5. Perlu pelestarian cagar budaya yang berpotensi menjadi daya tarik wisata

Sumber: RIPPAR Provinsi Sumatera Selatan

D.1. Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Muara Enim

- (1) Membuat dan mengembangkan program *calendar of event* dengan inovatif dan alternatif berkonsep kuat dan berkelanjutan.
- (2) Membangun fasilitas untuk mendukung wisata berbasis Pariwisata Budaya dan Pariwisata Konvensi (MICE) seperti penyediaan gedung pertemuan/ konvensi, gedung pameran, dan fasilitas lainnya terutama di Kota Muara Enim dan Tanjung Enim.
- (3) Pelatihan *capacity building* bagi SDM bidang pariwisata terutama pendukung kegiatan berbasis MICE.
- (4) Meningkatkan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) untuk menjadi unggulan bagi Kepariwisataan Sumatera Selatan seperti: Air Terjun

Bedegung dan Tenang.

- (5) Perencanaan Kawasan Wisata/Resort terutama kawasan terintegrasi untuk pelatihan/outbond untuk mendukung MICE terutama di Kota Muara Enim dan Tanjung Enim.
- (6) Perencanaan dan pembangunan wisata buatan untuk mendukung MICE.
- (7) Menyiapkan sebagian ODTW menjadi bagian Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP).
- (8) Memperbaiki dan memelihara infrastruktur aksesibilitas yang ada dan pemberian tanda petunjuk lokasi ODTW.
- (9) Memberdayakan masyarakat terutama dalam meningkatkan produk industri rumah tangga pendukung oleh-oleh.

Tabel 4. Objek dan Daya Tarik Wisata pada Kawasan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Muara Enim

Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Muara Enim	Daya Tarik Wisata Alam		
	Berbasis Alam	Berbasis Budaya	Berbasis Minat Khusus
	1. Air Terjun Curup Tenang Bedegung 2. Air Terjun Dayang Rindu 3. Air Panas Gemuhak 4. Air Terjun Lemutu 5. Air Terjun Napal Carik 6. Danau Deduhok 7. Danau Segayam 8. Danau Lematang Putus	1. Bukit Semendo 2. Rumah Adat	1. Tambang Batubata PTBA 2. Kebun Binatang Sriwijaya 3. Kebun Kopi 4. Kebun Strawberry 5. Arung Jeram

Sumber: RIPPAR Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI UNGGULAN DAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PARIWISATA

A. Unggulan Wisata dan Komitmen Pihak Ketiga

Kabupaten Muara Enim juga telah merancang desa wisata yang tersebar di 7 kecamatan dan 15 desa. Potensi wisata desa tersebut memiliki potensi unggulan desa yang terdiri dari buah-buahan (produk lokal selai, dodol, wajik dan lain-lain), wisata alam (air terjun), budaya lokal, agrowisata (Tabel 5.1). Produk-produk yang akan dikembangkan tidak lepas dari aspek keberlanjutan.

Objek wisata tersebut telah memenuhi unsur pembangunan pariwisata yang berkelanjutan antara lain:

- 1) Melibatkan partisipasi masyarakat: masyarakat harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dikembangkan dan berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang ada.
- 2) Keikutsertaan para *stakeholder* involment: Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi, pemerintah daerah, asosiasi bisnis, perusahaan dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan (*stakeholder*).
- 3) Kepemilikan lokal; pembangunan

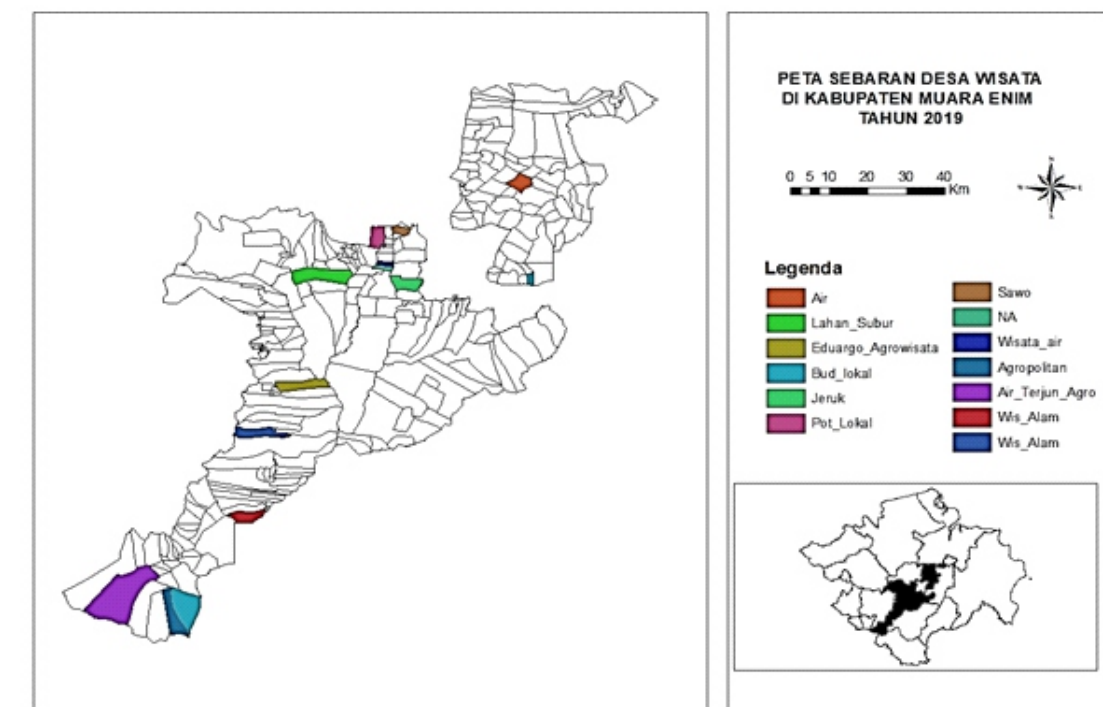
pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, *homestay* seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat.

- 4) Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan; pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan.
- 5) Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat: Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya adanya kerjasama dalam wisata mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pemasaran;
- 6) Promosi
Promosi merupakan media yang dapat digunakan dalam penyebaran informasi mengenai pariwisata. Secara spasial sebaran potensi pariwisata unggulan di Kabupaten Muara Enim terlihat pada Gambar 7.

Tabel 5. Potensi Unggulan Destinasi Wisata dan Dukungan Pihak Ketiga

No	Kecamatan	Desa	Potensi	Pihak Ketiga
1	Rambang Niru	1. Air Talas 2. Tebat Agung 3. Kasih Dewa	Jeruk (selai, sirup, pie) Wisata air (spot swafoto, wisata air, pemancingan)	PT. Pertamina Persero PT. TEL PT. TEL
2	Gunung Megang	1. Sidomulyo 2. Sumaja Makmur	Madu	PT. Pertamina Persero PT Medco
3	Empat Petulai Dangku	1. Dangku 2. Banuayu	Sawo (bahan olahan dodol, permen, wajik, sirup dan selai) Olahan ikan patin	PT. TEL PT TEL
4	Semende Darat Ulu	1. Segamit 2. Pelakat 3. Tanjung Tiga	Daerah Hamparan utk spot wisata air terjun, agropolitan, budaya lokal	Supreme
5	Lawang Kidul	1. Tegal Rego	Potensi Eduargo, agrowisata	PT. Bukit Asam Persero
6	Tanjung Agung	1. Tanjung Karang 2. Sleman 3. Bedegung	Wisata Alam (air terjun)	PT. Bukit Asam Persero PT. Bukit Asam Persero PT. Bukit Asam Persero
7	Gelumbang	1. Midar	Lemon	Pertamigas

Sumber: Rumah UMKMK Gerbang Serasan, 2019

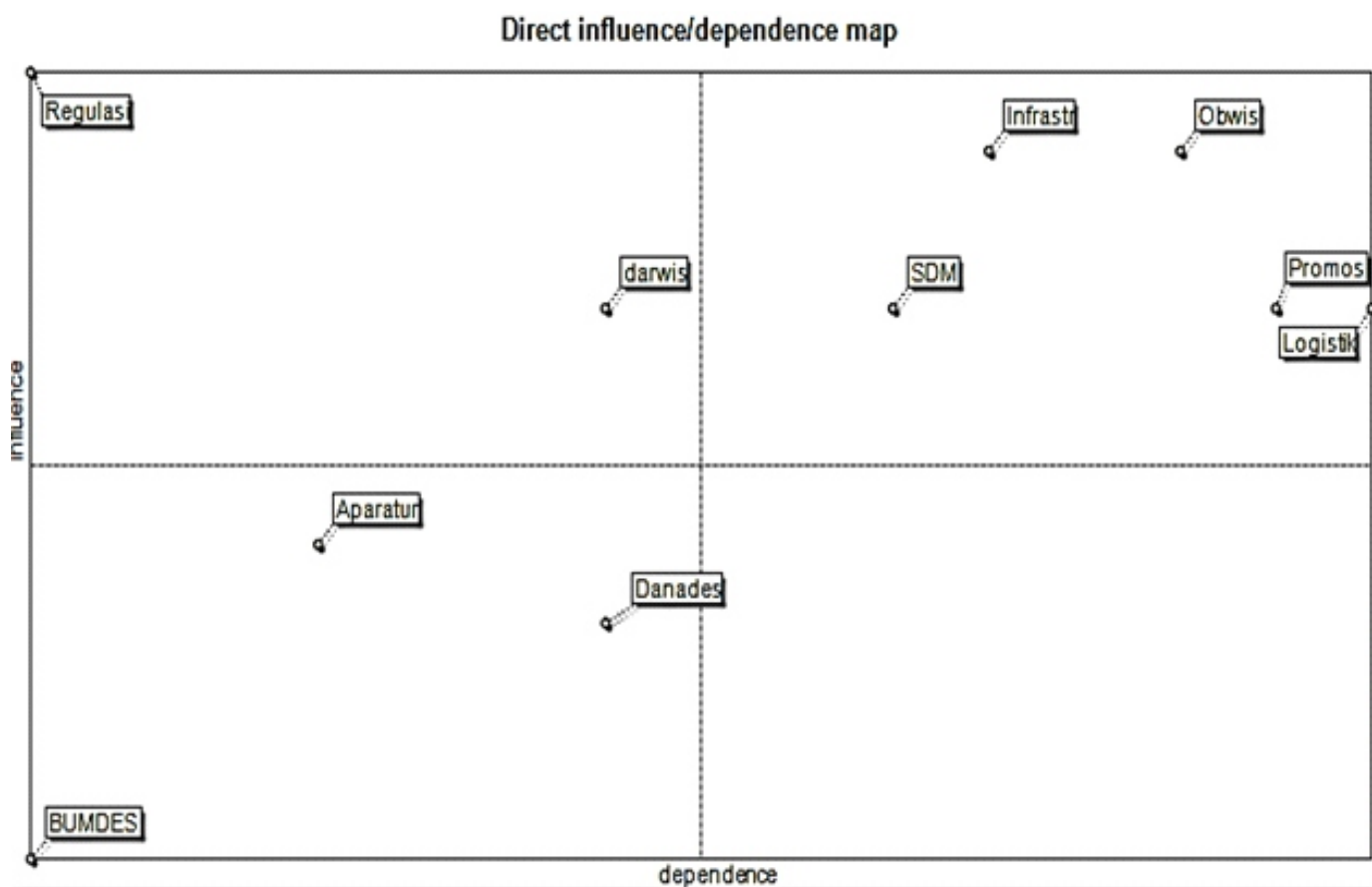


Gambar 7. Sebaran Potensi Unggulan Pariwisata Kabupaten Muara Enim
Sumber: UPPM FE Unsri, 2019

Produk unggulan berlokasi di 15 desa sehingga menjadi objek wisata desa. Keberlangsungan wisata desa akan sangat tergantung dari faktor-faktor yang terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Regulasi (peraturan pemerintah daerah) dan Kelompok Sadar Wisata berpengaruh besar terhadap keberadaan desa wisata namun berdampak kecil. Oleh karena itu, diperlukan aspek kelembagaan (peraturan daerah) yang menguatkan keberadaan kelompok sadar wisata. Hal

ini penting karena kelompok sadar wisata merupakan ujung tombak keberhasilan desa wisata di Kabupaten Muara Enim.

Sementara itu, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, keberadaan objek wisata dan promosi, logistik (travel agen, homestay, tiket) memiliki pengaruh dan dampak besar terhadap perkembangan desa wisata. Namun, BUMDesa, Aparatur Desa dan Dana Desa memiliki pengaruh yang kecil dan dampak yang kecil terhadap keberadaan desa wisata (Gambar 8)



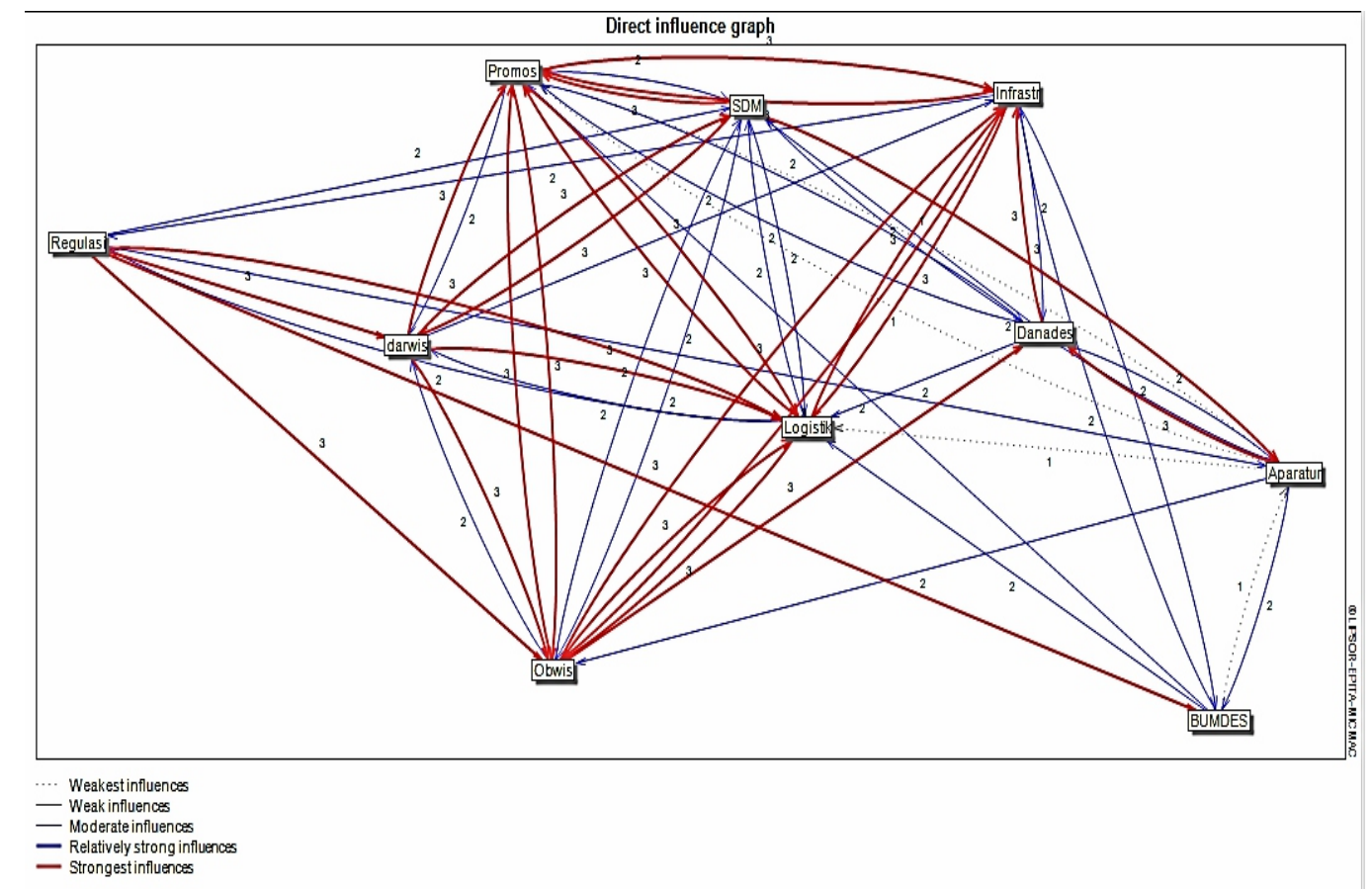
Gambar 8. Pengaruh Langsung Variabel terhadap Keberadaan Desa Wisata
Sumber: Data Lapang (diolah), 2019

Secara grafik terlihat sumber daya manusia, infrastruktur, logistik dan promosi merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang besar. Implikasinya pemerintah daerah harus mempertimbangkan variabel-variabel tersebut ketika mengembangkan desa wisata (Gambar 9).

Hasil olahan data pada Gambar 8 dan 9 sejalan dengan optimalisasi pengembangan pariwisata menurut Pendit

(2003), pengembangan pariwisata tidak akan berjalan baik apabila tidak memiliki unsur-unsur berikut:

1. Politik dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
2. Perasaan ingin tahu;
3. Sifat ramah tamah dan budaya masyarakat;
4. Jarak dan waktu (aksesibilitas);
5. Atraksi;
6. Akomodasi;
7. Pengangkutan (*courier*);
8. Harga-harga;
9. Publisitas dan promosi;
10. Kesempatan berbelanja.



Gambar 9. Pengaruh Faktor dalam Pengembangan Desa Wisata
Sumber: Data Lapang (diolah), 2019

Kesepuluh poin tersebut menjadi syarat dalam pengembangan pariwisata, pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu melakukan penguatan pada beberapa poin yaitu akestabilitas ke tempat wisata, akomodasi dan pengangkutan publisitas dan belanja. Beberapa tempat wisata yang ada belum terintegrasi dengan baik sehingga diperlukan *road map*/rencana aksi daerah dalam mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim

Keberadaan infrastruktur, logistik, objek wisata, promosi menjadi faktor dominan dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi program antar OPD.

B. Prinsip Aspek Pembangunan Kepariwisataan

Pengembangan kepariwisataan baik pusat dan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang kepariwisataan, dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan untuk mendoraong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global.

Pasal 33 dalam undang-undang tersebut pada konteks pemerintah daerah dapat diterjemahkan bahwa dalam rangka

meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, yang meliputi bidang (1) pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina, (2) keamanan dan ketertiban, (3) prasarana umum berupa jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan, (4) transportasi darat, laut, dan udara, serta (5) promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

Rencana aksi pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim berpedoman pada prinsip dan aspek pembangunan kepariwisataan. Beberapa poin yang menjadi penenakan dalam kajian ini adalah koordinasi lintas sektor yang harus dilakukan oleh organisasi perangkat daerah.

C. Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata

Rencana Aksi pengembangan Pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim akan mulai dilaksanakan pada tahun 2020. Strategi ini mendukung tindakan kolaboratif antara para pemangku kepentingan dalam perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan objek wisata alam di Kabupaten Muara Enim sebagai sebuah tujuan tunggal. Strategi ini menetapkan

program yang rinci, anggaran dan realisasi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim berdasarkan pemanfaatan objek wisata di Kabupaten Muara Enim. Program untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi/program pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM mencakup:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata
 1. Pengembangan daya tarik wisata utama di setiap kawasan pariwisata unggulan berstandar lokal, regional dan nasional.
 2. Pengembangan jalur wisata tematik dengan tema utama Kabupaten Muara Enim
 3. Pembangunan fasilitas dan prasarana umum tematik di setiap jalur wisata (air bersih, jaringan komunikasi, listrik, rumah singah)
 4. Pengembangan koordinasi lintas sektor dan kerja sama dengan dunia usaha dalam pengembangan aksesibilitas nasional.
 5. Pengembangan investasi usaha pariwisata berbasis wisata alam, kuliner, ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pameran berstandar nasional.
- b. Pembangunan Industri Pariwisata
 1. Pengembangan usaha pariwisata tematik, berbasis masyarakat,

- berstandar nasional
2. Memperkuat posisi UMKM dalam menunjang pasar pariwisata
3. Peningkatan keragaman dan kualitas produk UMKM

c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata/Promosi

1. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dan tematik Kabupaten Muara Enim
2. Pengembangan paket wisata tematik dan interpretatif.

d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

1. Pengembangan koordinasi berkesinambungan dalam pembangunan aksesibilitas yang menghubungkan pusat-pusat pariwisata dengan daya tarik wisata unggulan, di Kabupaten Muara Enim.
2. Pengembangan koordinasi tahunan dalam penyepakatan, penetapan, dan pelaksanaan program strategis bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media).

Pengembangan sebuah sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Tabel 6. Prinsip dan Aspek Pembangunan Kepariwisataan

Muatan	Uraian	
Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan	(1) Menjunjung tinggi norma agama dan budaya (2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman, budaya dan kearifan lokal (3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas (4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup (5) Memberdayakan masyarakat setempat (6) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antar pusat dan daerah serta keterpaduan antarpemangku kepentingan (7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan (8) Memperkuat keutuhan NKRI	
Aspek yang Diatur dalam Pembangunan Kepariwisataan	Pembangunan Industri Pariwisata	(1) Struktur pariwisata (2) Daya saing produk wisata (3) Kemitraan usaha pariwisata (4) Promosi pariwisata (5) Kredibilitas bisnis (6) Tanggungjawab terhadap lingkungan
	Pembangunan Destinasi Pariwisata	(1) Perwilayahan pariwisata (2) Daya tarik wisata (3) Aksestabilitas pariwisata (4) Prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata (5) Pemberdayaan masyarakat (6) Investasi pariwisata
	Pembangunan Pemasaran Pariwisata	(1) Pasar wisatawan (2) Citra pariwisata (3) Kemitraan pemasaran pariwisata (4) Promosi pariwisata
	Pembangunan Kelembagaan Pariwisata	1. Organisasi kepariwisataan 2. Sumber daya pariwisata 3. Regulasi dan mekanisme operasional bidang kepariwisataan
Koordinasi	Koordinasi Lintas Sektor	1. Koordinasi strategis lintas sektor dilakukan pemerintah daerah pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan 2. Koordinasi strategis lintas sektor pada bidang 1. Keamanan ketertiban 2. Prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan kesehatan lingkungan 3. Transportasi darat 4. Promosi dan kerjasama lokal, nasional dan luar negeri

Sumber: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

1. KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan diharapkan mampu mendorong percepatan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sektor jasa, industri pariwisata dinyakini akan menciptakan *income multiplication* yang besar bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim. Jumlah UMKM pada tahun 2018 sebanyak 5.336 UMKM baik mikro, kecil ataupun menengah dan meningkat sebanyak 115 unit bila dibandingkan tahun 2017.

Jumlah wisatawan domestik juga mengalami peningkatan yang sangat tajam, data tahun 2016 menunjukkan jumlah wisatawan domestik sebanyak 36.783 orang dan meningkat sebesar 31,75% pada tahun 2017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat dan potensi wisata di kabupaten Muara Enim serta adanya pergeseran prioritas penggunaan dana desa. Namun, disisi lain jumlah wisatawan mancanegara menurun sangat tajam, tahun 2016 sebanyak 45 orang dan pada tahun 2017 hanya sebanyak 5 orang.

Peningkatan kinerja industri pariwisata erat kaitannya dengan aktivitas industri UMKM. Destiniasi wisata yang dibaur dengan potensi desa tentunya telah

menjadi tren di beberapa wilayah. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah memiliki 15 desa wisata yang tersebar di 7 kecamatan. UMKM yang ada telah didampingi pihak ketiga (perusahaan BUMN maupun BUMS) sehingga kesulitan mendasar yang dihadapi oleh UMKM seperti kurangnya permodalan, terbatas akses pemasaran, kelembagaan yang belum optimal, kualitas produk yang memenuhi standar, pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan kurang profesional dalam mengelola usaha dapat diatasi.

Beberapa program telah dilakukan oleh beberapa dinas terkait guna memicu peningkatan UMKM seperti program pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan sentra-sentra industri, peningkatan kelembagaan U M K M , dan pengembangan kewirausahaan. Hasil kajian menunjukkan prioritas produk UKM yang mendorong pengembangan pariwisata adalah industri kreatif kuliner dan kerajinan tangan. Kedua jenis produk ini melibatkan partisipasi masyarakat sehingga keberlangsungannya dapat terjamin. Selain itu, Kabupaten Muara Enim memiliki potensi desa wisata yang telah mendapat pendampingan pihak ketiga sehingga implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan

dapat terwujud.

Permasalahan terbesar dalam pengembangan pariwisata adalah objek wisata yang belum dikelola secara optimal, ego sektoral, peraturan daerah yang belum berjalan dengan baik, kondusifitas keamanan, infrastruktur (jalan, air, komunikasi, listrik).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa Regulasi (peraturan pemerintah daerah) dan Kelompok Sadar Wisata berpengaruh besar terhadap keberadaan desa wisata namun berdampak kecil. Sementara itu, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, keberadaan objek wisata dan promosi, logistik (*travel agen*, *homestay*, tiket) memiliki pengaruh dan dampak besar terhadap perkembangan desa wisata. Namun, BUMDesa, Aparatur Desa dan Dana Desa memiliki pengaruh yang kecil dan dampak yang kecil terhadap keberadaan desa wisata.

Secara umum, rencana aksi daerah untuk pengembangan pariwisata mencakup: 1) pembangunan destinasi pariwisata, 2) pembangunan industri pariwisata, 3) pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan

kelembagaan kepariwisataan.

REKOMENDASI

1. Pemerintah daerah sebaiknya menetapkan regulasi tentang 15 desa wisata di Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah daerah sebaiknya menetapkan regulasi tentang kelompok sadar wisata Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah daerah sebaiknya memfokuskan pengembangan kepariwisataan pada 15 desa yang telah ada/memperoleh pendampingan daerah pihak ketiga.
4. Pemerintah sebaiknya memperhatikan faktor-faktor (infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, keberadaan objek wisata dan promosi, logistik (*travel agen*, *homestay*, tiket) yang memiliki pengaruh besar dan berdampak besar terhadap keberadaan desa wisata.
5. Pemerintah daerah sebaiknya mengembangkan jalur wisata tematik berbasis masyarakat dalam bentuk paket wisata.
6. Pemerintah daerah mengoptimalkan koordinasi antar OPD terkait guna mengurangi ego sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. Muara Enim Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Muara Enim*. Muara Enim: BPS
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim. 2018
- Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim. 2018 Rencana Strategi Dinas Perdagangan Kab. Muara Enim
- Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Muara Enim, 2018-2023
- Rencana Strategi Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Muara Enim, 2018-2023
- Rencana Strategi Dinas Bappeda Kab. Muara Enim, 2018-2023
- RPJMD 2018-2023 Kabupaten Muara Enim
- Rumah UMKMK Gerbang Serasan. 2019.